https://digilib.esaunggul.ac.id

SUMMARY

PENERAPAN PERAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Created by SEMUEL MUDJA

Subject : badan permusyarawatan desa, peraturan desa

Subject Alt : Village Consultative bodies, village regulations

Keyword : : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Legal Decision Making, Peraturan Desa

Description :

Bahwa dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 huruf (a) Menyebutkan bahwa Badan Permusyarawatan Desa berfungsi “Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa”. sesuai dengan hasil survey penulis bahwa di kecamatan Loloda secara keseluruhan belum mengikuti prosedur normativ sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Karena dalam kenyataannya, Pemerintah Desa untuk membuat satu peraturan desa mereka bekerja sama dengan pemerintah kecematan dan pemerintah daerah untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam membuat peraturan desa tersebut. Padahal secara normativ berdasarkan pasal 55 huruf (a) diatas adalah kewenangan BPD untuk merancang peraturan desa bersama kepala desa dan dapat mensosialisasikan peraturan desa tersebut kepada masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Proses penyusunan dan penetapan peraturan Desa Kec.Loloda, Kab. Halmahera Barat, Propinsi. Maluku Utara?(2) Kendala apa saja yang dihadapi BPD Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat, Propinsi. Maluku Utara dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa? Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan peran BPD Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2) Mendeskripsikan Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes di Kecamatan Loloda (3) Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat Yuridis Sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) metode wawancara, (2) metode dokumen. Sedangkan metode analisa digunakan adalah metode analisa diskritif Yuridis Empiris dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang benar akan tetapi belum maksimal sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Mendagri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis. Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukan dengan kurang komprehensipnya BPD di Kecamatan Loloda dalam membingkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Intern dan Ekstern. Sehingga saran yang diajukan dalam Tesisi ini ialah perlu adanya perhatian khusus dari PEMDA serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa.

Contributor : Wasis Susetio

Date Create : 02/03/2017

Type : Text

Format : PDF

Language : Indonesian

Identifier : UEU-Master-201404033

Collection : 201404033

Source : Master Theses of Law

Relation COllection : Fakultas Hukum

COverage : Civitas Akademi Universitas Esa unggul

Right : @perpustakaan universitas esa unggul

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor